



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

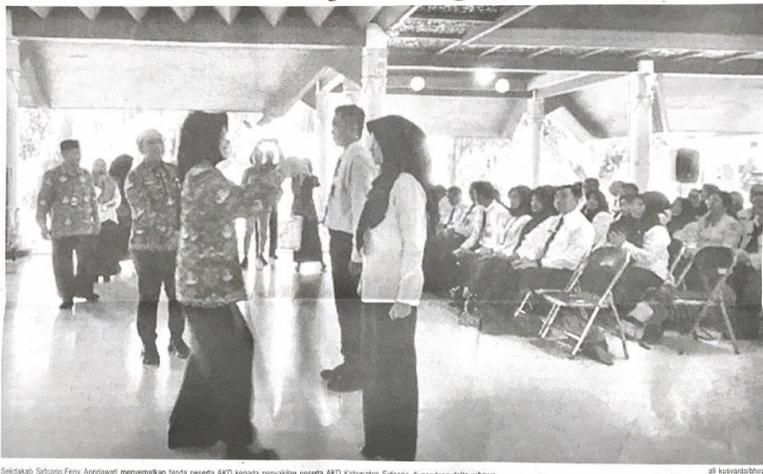
EDISI, Kamis 18 April 2024



RINGKASAN BERITA HARI INI

Pegawai Pemerintah Saat ini Wajib Mengikuti Kediklatan

Sidoarjo, Bhrwa - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Rabu (17/4) kemarin, menggelar kegiatan Analisis Kebutuhan Dilat (AKD) untuk pegawai di Pemkab Sidoarjo. Dilat 40 orang pejabat dan OPD, tingkat Kasubag Urutan Kepegawaian dan Dinas, Badan dan Kecamatan. Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, menyampaikan kegiatan akan dilaksanakan selama 14 hari, baik secara kelas maupun outclass. "Dari kegiatan ini, kita berharap mereka nantinya akan mampu menyusun secara teknis, jenis-jenis dilat yang memang sangat dibutuhkan di OPD mereka," ujar Budi Basuki, di pendopo Delta Witawa bagian belakang. Kegiatan AKD tersebut, kata Budi, bekerja sama dengan BPSDMP Provinsi Jawa Timur. Kepala BPSDMP Provinsi Jawa Timur, DR Ramlyanto, ketika memberikan sambutannya, merespon kegiatan AKD yang digelar oleh Kabupaten Sidoarjo tersebut, dikarenakan tidak semua Kabupaten/Kota melakukan AKD. Karena, dilat belakangi banyak faktor. Masalah anggaran salah satunya. Yang jelas, tegas Ramlianto, pemberian kediklatan bagi ASN saat ini adalah hal yang bersifat wajib. Apalagi memang ada undang-undang yang telah mengaturnya. "Kediklatan bagi pegawai, harus diberikan secara terus menerus dan terintegrasi. Kita butuh dilat untuk pengembangan kompetensi pegawai," ujarnya. Maka itu, menurutnya semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, terus mendorong untuk kontinuitas dalam pengembangan kompetensi pegawai. Saat ini berbagai macam jenis kediklatan bisa untuk dilakukannya, karena melihat perkembangan dan tuntutan zaman dan pekerjaan. Sekda Kabupaten Sidoarjo, DR Fery Apridawati, yang menutupi kegiatan AKD tersebut berharap outputnya tidak hanya pada internal pegawai di Pemkab Sidoarjo saja, melainkan juga pada masyarakat secara luas. [Ruspar]



Sekda Kabupaten Sidoarjo, DR Fery Apridawati menyaksikan tanda peserta AKD kepada perwakilan peserta AKD Kabupaten Sidoarjo di pendopo Delta Witawa.



Ditetapkan Tersangka KPK, Ketua PCNU Sidoarjo Doakan Gus Muhdlor Bisa Melewati Ujian Ini

Rabu, 17 April 2024 | 20:08



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (kiri tengah) dan Ketua PCNU Sidoarjo KH Zainal Abidin (kanan tengah) saat peresmian gedung di MINU Pucang Sidoarjo. Foto: Istimedia

Dua Pertiga Lulusan SD Tak Tertampung SMP Negeri

Ada Kuota Zonasi Pemerataan Khusus di 155 Desa



Tahun	Lulusan SD	Kuota SMPN
2023	34.502	13.206
2024	35.769	13.390

SIDOARJO - Meski kuota siswa baru SMPN tahun ini bertambah, komposisi lulusan SD yang bisa tertampung tidak bertambah. Sebab, pertambahan kuota jauh lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan SD tahun ini. Hanya sepertiga lulusan SD tahun ini yang bisa masuk SMP negeri (lihat grafik). Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, memang ada kenaikan jumlah lulusan, sedangkan kuota yang masuk SMPN tidak bertambah banyak. Kuotanya hanya bertambah 180. Mereka yang tak tertampung bisa memilih sekolah swasta. "Pemkab dan dinas pendidikan dan kebudayaan juga harus memberikan ruang bagi sekolah-sekolah swasta," ujar Bangun.

Kabid Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netty Lastiningsih mengatakan, khusus untuk peserta didik yang tinggal di desa jauh dari SMPN terdekat, diberlakukan zonasi pemerataan. Total ada 155 desa yang masuk area zonasi pemerataan dengan keseluruhan kuota yang diterima sebanyak 174 siswa. Artinya, dalam satu desa ada sekitar 1-2 siswa yang diterima melalui jalur zonasi pemerataan. "Mereka masuk jalur zonasi, nanti sistem yang mengolah," katanya. Di antaranya, Desa Singopadu, Masangan Kulon, dan Ngaban.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, untuk tahun ini, pihaknya juga menjamin siswa lulusan dari SD/MI sulit terjangkau bisa diterima di SMP negeri. Mereka bisa mendaftar lewat jalur afirmasi. "Pasti diterima," kata Tirto. Ada delapan SD/MI yang masuk kategori sulit terjangkau. Yakni, SDN Gebang 2 Sidoarjo, MI Al-Abror Kalikajang Gebang Sidoarjo, SDN Kedungpeluk 2 Candi, SDN Sawohan 2 Buduran, SDN Tambak Kalsogo 1 Jabon, SDN Kupang 3 Jabon, SDN Kupang IV Jabon, dan SDN Kedungpandan 2 Jabon. (uzi/c7/any)



BERTAMBAH: Kondisi TPA Griyo Mulyo Jabon yang sudah penuh sampah.

Volume Sampah Naik 50 Persen Selama Libur Lebaran

KOTA - Volume sampah selama liburan mengalami peningkatan. Hampir naik sebesar 50 persen dari rata-rata sampah yang dihasilkan setiap harinya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat pada Radar Sidoarjo. "Untuk volume sampah, meningkat pada dua hari menjelang Lebaran kemarin, tanggal 8-9 April itu rata-rata 800an ton per hari, hampir dua kali dari rata-rata harian sebanyak 400-500an ton," ucapnya. TPA Griyo Mulyo, Jabon sempat libur dua hari. Yakni, pada tanggal

10 dan 11 April. Saat kembali beroperasi, pada 12 April terdapat 194 ton sampah yang masuk. Serta 310 ton di hari berikutnya. "Sampah tak banyak dikarenakan banyak TPS/TPSR yang belum operasional. Tanggal 15 April, TPS-3R sudah mulai beroperasi, sehingga sampah yang masuk mencapai 692 ton," terangnya. Saat ini, sampah harian yang masuk berada di sekitar angka 600 hingga 700 ton. Hajid memperkirakan jika angka tersebut akan bertahan hingga beberapa hari kedepan. "Sampai akhirnya landai di 400-500 ton kembali," ujarnya.

Kepala Bidang KRTH DLHK Sidoarjo Heri Santoso mengungkapkan, selama libur Lebaran petugas kebersihan tetap dikerahkan. Bahkan mereka bekerja seperti biasa selepas salat Idul Fitri. "Petugas lapangan DLHK gak ada libur, termasuk menjaga kebersihan penadapa setelah open house Bupati Sidoarjo pada Sabtu Minggu kemarin," terangnya. Berdasarkan data DLHK, terdapat 295 personel petugas kebersihan. Mereka membersihkan penumpukan sampah di titik keramaian. Khususnya di fasilitas publik seperti stasiun, terminal, rest area, hingga taman kota. (sa/vga)

Realisasi Pajak Masih Rp 25 M, Dewan Minta Optimalisasi

KOTA - Target pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar Rp 937 miliar diprediksikan sulit tercapai. Hal ini dikarenakan realisasi pajak daerah hingga pertengahan April 2024 menurut data Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) baru mencapai Rp 25 miliar. Angka itu sekitar 2,67 persen dari target. Menurut anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Deny Haryanto realisasi yang masih rendah ini perlu menjadi perhatian serius bagi BPPD Sidoarjo. "Kami mendorong BPPD untuk melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," ujar Deny.

Deny menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi pajak daerah, di antaranya masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, lemahnya sistem penagihan pajak, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pemungutan pajak. Dia meminta BPPD untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, BPPD juga perlu meningkatkan sistem penagihan pajak dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pemungutan pajak. "Kami yakin dengan upaya yang maksimal, target pendapatan pajak daerah Sidoarjo tahun 2024 dapat tercapai," tegas Deny. (nis/vga)



PERBAIKAN: Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengganti panel rambu lalu lintas di pertigaan Jalan Raya Pagerwojo kemarin.

Mati Kena Petir, Traffic Light Pagerwojo Diperbaiki

SIDOARJO - Traffic light (TL) di pertigaan Jalan Raya Pagerwojo yang mati sejak malam takbiran lalu akhirnya diperbaiki kemarin (17/4). TL mati karena panelnya rusak tersambar petir. "Proses perbaikan sudah tuntas. Saat ini sudah menyala kembali," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga. Benny mengatakan, TL Pagerwojo rusak sejak Selasa (9/4) malam. Meskipun TL mati, tidak sampai ada kemacetan. Sebab, area tersebut bukan jalan protokol besar dan lalu lintas tidak

terlalu ramai. "Tidak sampai macet parah karena pertigaan kecil," katanya. Selain itu, kondisi lalu lintas di Sidoarjo sepi karena masih momen Idul Fitri. Sementara ada petugas yang membantu penanganan dan beberapa polisi cepek yang membantu pengaturan lalu lintas di pertigaan tersebut. Sebenarnya, pihaknya ingin langsung melakukan perbaikan agar lampu tersebut bisa kembali menyala. Namun, ternyata peralatan untuk perbaikan lampu susah dicari karena masih kondisi libur Lebaran. (uzi/c19/any)

Batal Tidaknya Mutasi Tunggu Izin Kemendagri

Jika Ditolak, Besok Kembali ke Jabatan Lama

SIDOARJO - Pembatalan mutasi pegawai negeri sipil (PNS) yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunggu izin dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KPAN). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, mengatakan, pembatalan mutasi PNS yang dilakukan oleh Kemendagri akan menunggu izin dari KPAN. "Kita tunggu dulu, karena ini menyangkut urusan kepegawaian," ujarnya. Budi Basuki menambahkan, pihaknya akan menunggu kabar dari KPAN mengenai pembatalan mutasi PNS tersebut. "Kita tunggu dulu, karena ini menyangkut urusan kepegawaian," ujarnya.

Ringing sili nya karena kami yang penting ada kekeluhan, tapi apa pun kesimpulannya kami terima.

NOVANTO IKENNO - Kepala Dinas Perencanaan, Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan Daerah (KDD) Kabupaten Sidoarjo, Novanto Ikenno, mengatakan, pihaknya akan menunggu kabar dari KPAN mengenai pembatalan mutasi PNS tersebut. "Kita tunggu dulu, karena ini menyangkut urusan kepegawaian," ujarnya.

kepegawaian Daerah. Dirjo Penyanggah ini membuat kepala Dinas Perikanan Sidoarjo akan kembali komposisi empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya sudah ditugaskan kembali ke posisi semula. Di antaranya, Ferry akan kembali menjadi kepala dinas kesehatan, M. Mikhlamad yang saat ini menjabat sebagai sistem perencanaan dan penganggaran, dan Sidiyanto yang akan menjadi kepala badan kepegawaian.



RUTIN: Loket pembayaran pajak di kantor BPPD Sidoarjo.

Diperbanyak oleh Bagian Persidangan dan PerUndang-Undangan Sekretariat DPRD Sidoarjo



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pegawai Pemerintah Saat ini Wajib Mengikuti Kediklatan

Sidoarjo, Bhirawa

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sidoarjo, Rabu (17/4) kemarin, menggelar kegiatan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) untuk pegawai di Pemkab Sidoarjo.

Dikuti 40 orang pejabat dari OPD, setingkat Kasubag Umum Kepegawaian dan Diras, Badan dan Kecamatan. Kepala BKD Kabupaten Sidoarjo, Budi Basuki, menyampaikan kegiatan akan dilaksanakan selama 14 hari, baik secara inclass maupun outclass.

"Dari kegiatan ini, kita berharap mereka nanti akan mampu menyusun secara teknis, jenis-jenis diklat yang memang sangat dibutuhkan di OPD mereka," ujar Budi Basuki, di pendopo Delta Wibawa bagian belakang.

Kegiatan AKD tersebut, kata Budi, bekerja sama dengan BPSDMP Provinsi Jawa Timur.

Kepala BPSDMP Provinsi Jawa Timur, DR Ramliyanto, ketika memberikan sambutannya, merespon kegiatan AKD yang digelar oleh Kabupaten Sidoarjo tersebut, dikarenakan tidak semua Kabupaten/kota melakukan AKD. Karena, dilatar belakangi banyak faktor. Masalah anggaran salah satunya.

Yang jelas, tegas Ramliyanto, pemberian kediklatan bagi ASN saat ini adalah hal yang bersifat wajib. Apalagi memang ada undang-undang yang telah mengaturnya.

"Kediklatan bagi pegawai, harus diberikan secara terus menerus dan terintegrasi. Kita butuh diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai," ujarnya.

Maka itu, menurutnya semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, terus didorong untuk kontinyu dalam pengembangan kompetensi pegawai. Saat ini berbagai macam jenis kediklatan bisa untuk dilakukannya, karena melihat perkembangan dan tuntutan zaman dan pekerjaan.

Sekda Kabupaten Sidoarjo, DR Feny Apridawati, yang menutup kegiatan AKD tersebut berharap outputnya tidak hanya pada internal pegawai di Pemkab Sidoarjo saja, melainkan juga pada masyarakat secara luas. [kus.gat]



Sekdakab Sidoarjo, Feny Apridawati menyerahkan tanda peserta AKD kepada perwakilan peserta AKD Kabupaten Sidoarjo di pendopo delta wibawa.

ali kusyanto/bhirawa

Jawa Pos



BERTAMBAH: Kondisi TPA Griyo Mulyo Jabon yang sudah penuh sampah.

DOKRADAR SIDOARJO

Volume Sampah Naik 50 Persen Selama Libur Lebaran

KOTA-Volume sampah selama libur lebaran mengalami peningkatan. Hampir naik sebesar 50 persen dari rata-rata sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala TPA Griyo Mulyo Jabon, Hajid Arif Hidayat pada Radar Sidoarjo.

"Untuk volume sampah, meningkat pada dua hari menjelang Lebaran kemarin, tanggal 8-9 April itu rata-rata 800an ton per hari, hampir dua kali dari rata-rata harian sebanyak 400-500an ton," ucapnya.

TPA Griyo Mulyo, Jabon sempat libur dua hari. Yakni, pada tanggal

10 dan 11 April. Saat kembali beroperasi, pada 12 April terdapat 194 ton sampah yang masuk. Serta 310 ton di hari berikutnya.

"Sampah tak banyak dikarenakan banyak TPS/TPS3R yang belum operasional. Tanggal 15 April, TPS-3R sudah mulai beroperasi, sehingga sampah yang masuk mencapai 692 ton," terangnya.

Saat ini, sampah harian yang masuk berada di sekitar angka 600 hingga 700 ton.

Hajid memperkirakan jika angka tersebut akan bertahan hingga beberapa hari kedepan.

"Sampai akhirnya landai di 400-500 ton kembali," ujarnya.

Kepala Bidang KRTH DLHK Sidoarjo Heri Santoso mengungkapkan, selama libur Lebaran petugas kebersihan tetap dikerahkan. Bahkan mereka bekerja seperti biasa selepas salat Idul Fitri.

"Petugas lapangan DLHK gak ada libur, termasuk menjaga kebersihan penadapa setelah open house Bupati Sidoarjo pada Sabtu Minggu kemarin," terangnya.

Berdasarkan data DLHK, terdapat 295 personel petugas kebersihan. Mereka membersihkan penumpukan sampah di titik keramaian. Khususnya di fasilitas publik seperti stasiun, terminal, rest area, hingga taman kota. (sai/vga)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DITE SURENDRA/JAWA POS

PERBAIKAN:
Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo mengganti panel rambu lalu lintas di pertigaan Jalan Raya Pagerwojo kemarin.

Mati Kena Petir, Traffic Light Pagerwojo Diperbaiki

SIDOARJO - *Traffic light* (TL) di pertigaan Jalan Raya Pagerwojo yang mati sejak malam takbiran lalu akhirnya diperbaiki kemarin (17/4). TL mati karena panelnya rusak tersambar petir.

"Proses perbaikan sudah tuntas. Saat ini sudah menyala kembali," kata Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Sidoarjo Benny Airlangga. Benny mengatakan, TL Pagerwojo rusak sejak Selasa (9/4) malam. Meskipun TL mati, tidak sampai ada kemacetan. Sebab, area tersebut bukan jalan protokol besar dan lalu lintas tidak

terlalu ramai. "Tidak sampai macet parah karena pertigaan kecil," katanya.

Selain itu, kondisi lalu lintas di Sidoarjo sepi karena masih momen Idul Fitri. Sementara ada petugas yang membantu penanganan dan beberapa polisi cepek yang membantu pengaturan lalu lintas di pertigaan tersebut.

Sebenarnya, pihaknya ingin langsung melakukan perbaikan agar lampu tersebut bisa kembali menyala. Namun, ternyata peralatan untuk perbaikan lampu susah dicari karena masih kondisi libur Lebaran. (uzi/c19/any)

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Dua Pertiga Lulusan SD Tak Tertampung SMP Negeri

Ada Kuota Zonasi Pemerataan Khusus di 155 Desa

SIDOARJO – Meski kuota siswa baru SMPN tahun ini bertambah, komposisi lulusan SD yang bisa tertampung tidak bertambah. Sebab, pertambahan kuota jauh lebih kecil dibandingkan pertambahan jumlah lulusan SD tahun ini. Hanya sepertiga lulusan SD tahun ini yang bisa masuk SMP negeri (*lihat grafis*).

Sekretaris Komisi D DPRD Sidoarjo Bangun Winarso mengatakan, memang ada kenaikan jumlah lulusan, sedangkan kuota yang masuk SMPN tidak bertambah banyak. Kuotanya hanya bertambah 180. Mereka yang tak tertampung bisa memilih sekolah swasta. "Pemkab dan dinas pendidikan dan kebudayaan juga harus memberikan ruang bagi sekolah-sekolah swasta," ujar Bangun.



GRAFIS: BAGUS/JAWA POS

Kabid Mutu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Sidoarjo Netty Lastiningsih mengatakan, khusus untuk peserta didik yang tinggal di desa jauh dari SMPN terdekat, diberlakukan zonasi pemerataan.

Total ada 155 desa yang masuk area zonasi pemerataan dengan keseluruhan kuota yang diterima sebanyak 174 siswa. Artinya, dalam satu desa ada sekitar 1-2 siswa yang diterima melalui jalur zonasi pemerataan. "Mereka masuk jalur zonasi, nanti sistem yang mengolah," katanya. Di antaranya, Desa Singopadu, Masangan Kulon, dan Ngaban.

Kepala Dinas Dikbud Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, untuk tahun ini, pihaknya juga menjamin siswa lulusan dari SD/MI sulit terjangkau bisa diterima di SMP negeri. Mereka bisa mendaftar lewat jalur afirmasi. "Pasti diterima," kata Tirto.

Ada delapan SD/MI yang masuk kategori sulit terjangkau. Yakni, SDN Gebang 2 Sidoarjo, MI Al-Abror Kalikajang Gebang Sidoarjo, SDN Kedungpeluk 2 Candi, SDN Sawohan 2 Buduran, SDN Tambak Kalisogo 1 Jabon, SDN Kupang 3 Jabon, SDN Kupang IV Jabon, dan SDN Kedungpandan 2 Jabon. (*uzi/c7/any*)

Jawa Pos

SIDOARJO DALAM ANGKA

Kasus DBD Tiap Puskesmas di Sidoarjo Triwulan Pertama 2024

■ Puskesmas Waru : 9 kasus	■ Puskesmas Ganting : 3 kasus
■ Puskesmas Buduran : 6 kasus	■ Puskesmas Candi : 3 kasus
■ Puskesmas Sidodadi : 6 kasus	■ Puskesmas Sukodono : 3 kasus
■ Puskesmas Barengkrajan : 4 kasus	■ Puskesmas Taman : 3 kasus
■ Puskesmas Krian : 4 kasus	■ Puskesmas Tulangan : 3 kasus
■ Puskesmas Trosobo : 4 kasus	
■ Puskesmas Urangaagung I : 4 kasus	

Sumber:
Dinas Kesehatan
Sidoarjo



GRAFIS: RIZKY/JAWA POS

SEMENTARA itu, untuk puskesmas lainnya, hanya ada 1-2 kasus DBD yang ditangani. Total ada 74 kasus DBD. Kasus kematian akibat DBD juga tidak ditemukan. (eza/c7/any)

Jawa Pos

Batal Tidaknya Mutasi Tunggu Izin Kemendagri

Jika Ditolak, Besok Kembali ke Jabatan Lama

SIDOARJO - Pemkab Sidoarjo sampai saat ini masih menunggu jawaban dari Kemendagri terkait izin pengangkatan dalam jabatan 495 pejabat dan ASN Sidoarjo yang dilantik 22 Maret lalu. Jika dapat izin, mutasi berlaku. Jabatan baru dipertahankan. Jika tidak, ratusan ASN dan pejabat

yang dimutasi balik kucing ke posisi sebelumnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sidoarjo Fenny Apridawati mengatakan, hingga kemarin pihaknya masih menunggu jawaban dari izin yang sudah disampaikan Pemkab Sidoarjo ke Kemendagri. "Saat ini masih berproses di Kemendagri," kata Fenny kemarin.

Apa pun hasilnya, Pemkab Sidoarjo bakal melaksanakan. "Yang penting Pemkab Sidoarjo patuh dan taat pada ketentuan," ujarnya. Fenny

mengatakan, pembatalan mutasi berlaku mulai besok (19/4). Namun, tidak berarti seluruhnya langsung kembali ke jabatan semula. Mereka masih menunggu surat perintah melaksanakan tugas (SPMT) untuk kembali melaksanakan tugas pada jabatan sebelumnya.

"Jika belum mendapat SPMT, belum pindah dulu," katanya. Karena sudah berlangsung hampir satu bulan, para ASN sudah melaksanakan tugas dan penyesuaian diri di tempat

●●
Bingung sih iya karena kami yang penting ada kejelasan, tapi apa pun keputusannya kami terima."
NOVIANTO KOESNO
Kasi Operasi dan Penindakan Perda Satpol PP Sidoarjo

mereka yang baru. Karena itu, pembatalan tersebut tidak serta-merta langsung menarik

lagi ASN ke jabatan yang lama. Namun, menunggu SPMT lebih dulu.

Jika nanti ada pembatalan, komposisi empat pejabat pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya sudah dilantik akan kembali ke posisi semula. Di antaranya, Fenny akan kembali menjadi kepala dinas kesehatan, M. Makhmud yang saat ini menjabat sebagai asisten perekonomian dan pembangunan Setda Sidoarjo akan menjadi kepala badan

kepegawaian daerah, Dwijono Prawito yang saat ini menjabat kepala Dinas Perikanan Sidoarjo akan kembali menjabat kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sidoarjo, dan Budi Basuki yang menjabat sebagai kepala BKD Sidoarjo akan kembali menjadi asisten perekonomian dan pembangunan Setda Sidoarjo. Novianto Koesno yang kini menjabat Kasi Operasi dan Penindakan Perda Satpol PP Sidoarjo mengatakan taat

dan akan mengikuti keputusan apa pun. "Bingung sih iya karena kami yang penting ada kejelasan, tapi apa pun keputusannya kami terima," katanya.

Sebelumnya, Novi menjabat sebagai penyidik LLAJ Dinas Perhubungan Sidoarjo. Novi menyebut pada 19 April dirinya tidak langsung kembali ke dishub. "Nunggu SPMT dulu karena kan panjang rentetannya terkait tunjangan dan lainnya," ujarnya. (uzi/c19/any)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Realisasi Pajak Masih Rp 25 M, Dewan Minta Optimalisasi

KOTA-Target pendapatan pajak daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2024 sebesar Rp 937 miliar diprediksikan sulit tercapai. Hal ini dikarenakan realisasi pajak daerah hingga pertengahan April 2024 menurut data Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) baru mencapai Rp 25 miliar. Angka itu sekitar 2,67 persen dari target.

Menurut anggota Komisi B DPRD Sidoarjo Deny Haryanto realisasi yang masih rendah ini perlu menjadi perhatian serius bagi BPPD Sidoarjo. "Kami mendorong BPPD untuk melakukan optimalisasi pemungutan pajak daerah agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," ujar Deny.

Deny menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya reali-

untuk membayar pajak, lemahnya sistem penagihan pajak, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses pemungutan pajak.

Dia meminta BPPD untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, BPPD juga perlu meningkatkan sistem penagihan pajak dan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah proses pemungutan pajak. "Kami yakin dengan upaya yang maksimal, target pendapatan pajak daerah Sidoarjo tahun 2024 dapat tercapai," tegas Deny. (nis/vga)



**RUTIN: LOKET PEMBAYARAN PAJAK DI KANTOR
BPPD SIDOARJO.**





Ditetapkan Tersangka KPK, Ketua PCNU Sidoarjo Doakan Gus Muhdlor Bisa Melewati Ujian Ini

Rabu, 17 April 2024 | 20:08



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali (kiri tengah) dan Ketua PCNU
Sidoarjo KH Zainal Abidin (kanan tengah) saat peresmian gedung di
MINU Pucang Sidoarjo/Foto: Istimewa

sidoarjonews.id



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

KOTA, SIDOARJONEWS.id – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Sidoarjo, KH Zainal Abidin menanggapi soal penetapan tersangka Ahmad Muhdlor, Bupati Sidoarjo, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan pemotongan insentif pajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Pemkab Sidoarjo.

Kiai Zainal tetap mendoakan Ahmad Muhdlor atau Gus Muhdlor bisa melewati masalah yang tengah dihadapinya dengan baik.

“Kami tetap mendoakan beliau (Gus Muhldor), mudah-mudahan ujian ini bisa dilampaui dengan baik,” kata Ketua PCNU Sidoarjo saat dikonfirmasi, Rabu (17/4/2024).



Menurutnya, Allah SWT menurunkan sebuah ujian dan cobaan kepada seseorang sebagai pertanda bahwa derajatnya akan ditinggikan.

“Kami yakin, setiap ujian diturunkan oleh Allah SWT, maka derajat akan diangkat,” ujarnya.





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Mantan Ketua KPU Sidoarjo menegaskan, Nahdlatul Ulama sebagai organisasi keagamaan selalu mendoakan agar Sidoarjo tetap kondusif dan aman, termasuk para pemimpin Sidoarjo diberikan keselamatan.



“Kita selalu doakan para pemimpin Sidoarjo diberikan keselamatan dan keamanan serta selalu dilindungi Allah SWT,” ujarnya.

“Seluruh masyarakat, khususnya warga nahdlyyin berharap Sidoarjo tetap kondusif dan maju,” tutupnya.

KPK mengumumkan status tersangka Ahmad Muhdlor Ali, Bupati Sidoarjo, pada 16 April 2024 kemarin. Ia menjadi tersangka ketiga dalam kasus dugaan pemotongan insentif pajak ASN di lingkungan BPPD Sidoarjo.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan Kasubbag Umum Siska Wati dan Ari Suryono Kepala BPPD Sidoarjo sebagai tersangka. Dia diduga telah memotong insentif pajak mulai 10 sampai 30 persen. Dalam kurun waktu 2023, hasil pemotongan ini terkumpul sekitar Rp2,7 miliar.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Usai ditetapkan tersangka KPK, Gus Muhdlor mengatakan akan menghormati setiap keputusan dari komisi antirasuah itu.



“Kami menghormati proses hukum di KPK,” ujarnya usai halal bihalal dengan ASN Pemkab Sidoarjo di Pendopo Delta Wibawa, pada (16/4) kemarin.

Putra KH Agoes Ali Masyhuri itu juga memohon doa kepada seluruh masyarakat Sidoarjo untuk bisa melewati persoalan hukum ini dengan baik.

“Saya juga mohon doa dari seluruh masyarakat Sidoarjo untuk bisa lewati proses ini dengan baik,” pungkasnya (ipung)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924
E-mail : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 15 April 2024

Nomor : 800//438 . 6 . 4/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Pembatalan Pengangkatan
Dalam Jabatan

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo
di -
SIDOARJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 821.2/815/438.1.1/2024 tentang Pembatalan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama ini disampaikan bahwa terhadap pelantikan pejabat tanggal 22 Maret 2024 dilakukan pembatalan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2024. Pembatalan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak tanggal 19 April 2024.

PEMERINTAHAN

SK Pembatalan Sudah Turun, Posisi FA Sebagai Sekda Banyak Dipertanyakan Keabsahannya

Diperbanyak oleh Subbag Persidangan, Risalah dan Humas Sekretariat DPRD Sidoarjo

Admin — 18/04/2024

liputansidoarjo.com



SIDOARJO (liputansidoarjo.com)- Keputusan pembatalan mutasi 500 jabatan yang dilakukan oleh Bupati Muhdlor Ali melalui surat keputusan Bupati nomor 821.2/815/438.1.1/2024 tentang pembatalan pengangkatan dalam jabatan, nampaknya masih menuai pro kontra di masyarakat.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telp. (031) 8921946, 8941145, Fax. 8946924
E-mail : bupati@sidoariokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

Nomor : 800//438 . 6 . 4/2024
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Pembatalan Pengangkatan
Dalam Jabatan

Sidoarjo, 15 April 2024
Kepada
Yth. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemkab. Sidoarjo
di –
SIDOARJO

Berdasarkan Keputusan Bupati Sidoarjo nomor 821.2/815/438.1.1/2024 tentang Pembatalan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, bersama ini disampaikan bahwa terhadap pelantikan pejabat tanggal 22 Maret 2024 dilakukan pembatalan untuk memenuhi ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 29 Maret 2024. Pembatalan pengangkatan dalam jabatan sebagaimana dimaksud mulai berlaku sejak tanggal **19 April 2024**.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pasalnya, pejabat yang dibatalkan jabatannya itu, termasuk adalah Fenny Apridawati sekretaris daerah Sidoarjo.

Fenny termasuk Sekda Fenny Apridawati yang dilantik pada 22 Maret 2024 kemarin, bersama beberapa kepala OPD dan ratusan pejabat lain

Otomatis, keabsahan Fenny sebagai Sekda Sidoarjo saat ini, dipertanyakan banyak pihak, meskipun dalam surat pembatalan itu berlaku efektif per tanggal 19 April 2024.

Mantan pejabat Sidoarjo yang minta namanya tidak disebutkan, menyatakan bahwa Fenny sebenarnya tidak sah mengeluarkan pengumuman apapun atas nama Sekda setelah adanya surat keputusan pembatalan itu.

Menjadi sangat lucu, ketika seorang pejabat yang batal jabatannya, masih tetap merasa seorang Sekda.



“Mestinya pengumuman pembatalan SK mutasi itu, diumumkan oleh Plt Sekda lama dan bukan Fenny, wong Fenny itu jabatannya batal kok masih mengumumkan,” ujarnya

Tidak hanya itu, walaupun BKD melakukan upaya fatwa ke Kemendagri untuk keabsahan mutasi tanggal 22 Maret lalu, itupun juga aneh.

“Mana ada fatwa petunjuk Kemendagri itu berlaku surut?, pelantikan sudah tanggal 22 Maret lalu, sekarang baru dimintakan petunjuk karena menabrak UU,” jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Damroni Chudlori ketua komisi A DPRD Sidoarjo, yang menyebut posisi Fenny sebagai sekda sampai tanggal 19 April 2024 perlu diteliti lagi keabsahannya.

Karenanya, komisi A akan menjadwalkan hearing pada Senin pekan depan, dengan menghadirkan ahli hukum tata negara.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Kita akan meminta pertimbangan dan masukan soal kasus di Sidoarjo ini. Karena faktanya, mutasi sudah dibatalkan, namun pejabatnya masih ada jeda waktu untuk menjabat,” ujar Damroni.

Persoalan jeda waktu jabatan yang dipegang pejabat batal ini, nampaknya juga membuat proses administrasi keuangan Pemkab menjadi pelik.

Karena bagaimanapun juga, selama tiga pekan pasca pelantikan pejabatan tanggal 22 Maret 2024 lalu itu, proses administrasi oleh pejabat baru sudah berjalan dan dianggap sah.

Sumber pejabat Bank di Sidoarjo juga merasa kebingungan dengan persoalan ini.

“Kalau batal seperti ini, bagaimana proses pencairan dana yang sudah ditandatangani oleh pejabat yang dibatalkan itu,” tuturnya.
(Abidin)

